



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

# Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun. Disamping menyajikan data perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

Plt. Kepala BKAD  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

  
**JETER SIMAMORA, S.IP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640420 198603 1 006

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	25
3.3. Program dan Kegiatan .....	25
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD</b> .....	32
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKAD merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Pasal 138 ayat ( 1 ) Perumusan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 2 ) huruf e, merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaibana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 138 ( 2 ) Perumusan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

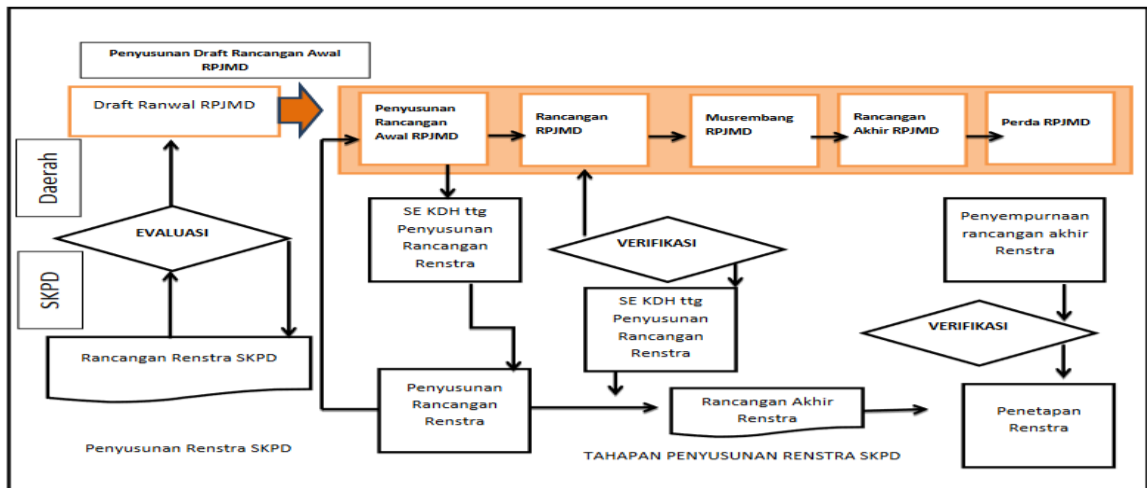
Pasal 138 ( 3 ) Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disajikan dengan sistematika sebagaimana dalam pasal 129.

Mengingat pentingnya arti dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD/SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Bupati Nomor : 050/353/V/Bappeda/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2023 dan Buku Panduan Rangkaian Musrenbang Tahun 2020 yang memuat mekanisme pelaksanaan dan informasi umum pelaksanaan rangkaian Munsrenbang tingkat Kabupaten.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

#### **10.1. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA)-SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, antara lain :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.

#### **10.2. Sistematika Penulisan**

Penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (RENJA), proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD/OPD dengan Renja K/L dan Renja Pro/Kab/Kota dari tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum.**

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (tahun n-1).

### **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.**

Kajian terhadap capaian pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.**

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD.**

Proses membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan mursreimbang.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumus isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah juga adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa BKAD selaku SKPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang tertuang dalam visi Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” dengan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai ke kota.

Dan INDIKATOR Program Pembangunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks Pengembangan Masyarakat (IPM)	(68,50)
2. Angka Harapan Lama Sekolah	(13,14)
3. Rata – rata lama sekolah	(7,95)
4. Usia harapan hidup	(68,30)
5. Pengeluaran perkapita ribu rupiah/orang/tahun	(9.606.000)
6. Status kabupaten layak anak (KLA)	(Madya)
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(88,50)
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(69,50)
9. Persentase pemuda berprestasi atau mandiri yang dibina	(45%)
10. Indeks pembangunan keluarga	(62,44)
11. Nilai persepsi rasa aman	(69)
12. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	(84,01%)
13. Indeks pembangunan kebudayaan	(70%)
14. Indeks Reformasi Birokrasi	(53)
15. Nilai SAKIP Kabupaten	(64,01)
16. Maturitas SPIP	(Level 3)
17. Nilai survey kepuasan masyarakat	(80,70)
<b>18. NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>(WTP)</b>
19. Laju pertumbuhan ekonomi	(2,50%)
20. PDRB perkapita (juta/orang)	(123,32)
21. Indeks kualitas lingkungan hidup	(68,70)
22. Indeks williamson	0,465)
23. Indeks infrastruktur	(67,85)
24. Indeks konektivitas	(0,447)

Dari uraian tersebut Evaluasi Perencanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BKAD kab. Tanjung Jabung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.1  
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 TERDAHAP RENSTRA BKAD  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
					TARGET RENJA TAHUN 2019	REALISASI RENJA 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN ( TAHUN 2020)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	<b>01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	5 Dokumen	10 Dokumen	100.00	
	04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst.. Yang disusun	4 Dokumen	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	3 Dokumen	12 Bulan 6 Dokumen	100.00	
	<b>07 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan keuangan tahunan OPD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	-	-	-	-	-	-	0.00	
	10 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	24 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
	11 Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	0.00	
	13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	<b>15 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
	17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	1 Kegiatan	2 Paket	2 Paket	100.00	1 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Paket	100.00	
	18 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>02</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
	05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	29 Media	29 Media	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
02	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
05	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	<b>100.00</b>	1 Kegiatan	3 Kegiatan	<b>100.00</b>	
01	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>100.00</b>	12 Bulan	<b>36 Bulan</b>	<b>100.00</b>	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100.00	-	24 Bulan	0.00	
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	0.00	
06	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah total BMD yang dipelihara</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulsn	100.00	
08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
<b>20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
<b>21</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	4 Dokumen	10 Dokumen	100.00	
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0.00	
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	8 Dokumen	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	8 Dokumen	100.00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja	44 SKPD	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	1 Kegiatan	2 Kegiatan		
<b>25</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Laporan	24 Bulan 12 Laporan		
27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	5 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	10 Dokumen	24 Bulan 10 Dokumen	100.00	
28	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
30	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
31	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
32	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
33	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
34	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
35	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
<b>36</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	12 Laporan	36 Laporan	100.00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	36 Laporan	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbub Penjabaran Tentang LKPD	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
38	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	100.00	
39	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
40	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
41	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	
42	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	100.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem	45 OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	6 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	36 Bulan	100.00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	-	-	-	-	0.00	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2021		
1	3	4	5	6	7			8	9	11	13	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Orang	24 Orang	
		Pelaksanaan Pentasahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatasahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Orang	105 Paket	105 Paket	110 Paket	110 Paket	115 Paket	80 Orang	80 Orang	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Bulan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	29 Media	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	29 Media	29 Media	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	65 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2021	
1	3	4	5	6	7			8	9	11	13
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	-	7 Unit	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Kegiatan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Bangunan	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	20 Unit	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	23 Kendaraan Dinas	23 Kendaraan Dinas	25 Kendaraan dinas	30 Kendaraan dinas	30 Kendaraan dinas	30 Kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	12 Bulan	12 Bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	44 SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	44 SKPD	44 SKPD





### 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi SKPD dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD diantaranya :

1. Penataan Akuntabilitas Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi berbasis elektronik.
2. Terdapat aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki legalitas ( Sertifikat ).

### 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rancangan Renja BKAD terhadap RKPd tahun 2022**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

NO	RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>BKAD</b>			<b>11,103,532,899</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>BKAD</b>			<b>9,938,932,350</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun</b>		<b>119,574,750</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun</b>		<b>119,574,500</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	47,375,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	47,374,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi APBD	<b>BKAD</b>	<b>LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst., Yang disusun</b>	4 Dokumen	72,199,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi APBD	BKAD	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst.. Yang disusun	4 Dokumen	72,199,600	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Laporan keuangan tahunan OPD</b>		<b>7,190,737,308</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Laporan keuangan tahunan OPD</b>		<b>6,891,051,750</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	6,418,792,308	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	6,060,901,750	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>BKAD</b>	<b>Jumlah ASN dibayarkan honorarium</b>	24 Orang	649,845,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>BKAD</b>	<b>Jumlah ASN dibayarkan honorarium</b>	24 Orang	810,200,000	
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	36,000,000	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 Dokumen	86,100,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 Dokumen	19,950,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>104,650,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>120,000,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	54,650,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	120,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	5 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	5 Orang	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)</b>		<b>1,388,583,993</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)</b>		<b>1,128,782,100</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	61,996,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	17,370,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	205,994,511	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	214,800,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	63,800,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	130,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	30,792,982	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	49,999,900	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	29 Media	28,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	29 Media	38,175,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	900,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	599,237,200	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	12 Bulan	97,200,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	12 Bulan	79,200,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BKAD	<b>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>		<b>969,426,848</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BKAD	<b>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>		<b>35,152,000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	7 Kendaraan Dinas	542,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	7 Kendaraan Dinas	21,152,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	427,426,848	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	14,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BKAD	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>987,660,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BKAD	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>1,200,400,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	12 Bulan	3,660,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	12 Bulan	3,660,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	12 Bulan	264,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	12 Bulan	550,738,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	720,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	646,002,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BKAD	<b>Jumlah total BMD yang dipelihara</b>		<b>342,900,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BKAD	<b>Jumlah total BMD yang dipelihara</b>		<b>443,972,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	- 5 Unit mobil -20 Unit Motor	203,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	- 5 Unit mobil -20 Unit Motor	249,452,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	14 Unit	90,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	14 Unit	194,520,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	1 Unit	49,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	1 Unit	-	



NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		206,874,231,758	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		200,586,455,277	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		2,639,248,945	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1,626,825,300	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	168,992,750	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	236,087,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	168,992,750	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	231,865,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,044,483,400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	786,759,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	220,211,025	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	213,568,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)	1 Kegiatan	36,569,020	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)	1 Kegiatan	158,544,900	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1,700,935,250	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		470,468,100	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	240,297,500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	203,783,000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	44 SKPD	87,604,250	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	44 SKPD	93,570,100	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	44 SKPD	768,350,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	44 SKPD	26,400,000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	4 Dokumen	194,000,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	4 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BKAD	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	44 SKPD	28,507,500	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BKAD	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	44 SKPD	50,052,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	44 SKPD	42,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	44 SKPD	-	
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	41,776,000	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	50,605,000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	209,600,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	46,058,000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	4 Dokumen	43,700,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	4 Dokumen	-	
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	44,600,000	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	-	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>		<b>963,000,000</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>		<b>694,364,000</b>	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	24 Laporan	130,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	24 Laporan	113,004,000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	4 Dokumen	130,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	4 Dokumen	219,708,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	BKAD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbup Penjabaran Tentang LKPD	1 Dokumen	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	BKAD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbup Penjabaran Tentang LKPD	1 Dokumen	-	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah un-audited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	230,000,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah un-audited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	361,652,000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Dokumen	123,000,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Dokumen	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	1 Kegiatan	200,000,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	1 Kegiatan	-	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	BKAD	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>201,571,047,563</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	BKAD	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>197,794,797,877</b>	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	192,316,809,615	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	182,625,691,600	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	5,411,624,400	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	12,193,776,277	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	3,842,613,548	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	2,975,330,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	BKAD	<b>Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</b>		<b>1,531,110,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	BKAD	<b>Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</b>		<b>1,565,100,000</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	BKAD	<b>Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah</b>		<b>1,531,110,000</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	BKAD	<b>Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah</b>		<b>1,565,100,000</b>	
	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	96,500,000	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	194,800,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	41,940,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	45 OPD	169,750,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	45 OPD	202,440,000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	70,000,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	79,860,000	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	10 dokumen	428,700,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	10 dokumen	425,540,000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	77,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	20,350,000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	459,160,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	378,480,000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	45 OPD	110,000,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	45 OPD	148,230,000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	2 Dokumen	70,000,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	2 Dokumen	73,460,000	
					<b>219,508,874,657</b>					<b>212,090,487,627</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program seseuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 Yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam RPJMD tahun 2020-2024 dengan tema “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN” melalui “PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. dengan 7 agenda pembangunan yang diantaranya yaitu pada point ke 3 yaitu “MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. Yang diselaraskan dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu, “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK”. Dengan tujuan “TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL”. Dengan salah satu sasarannya “MENINGKATKAN KINERJA PENGANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” dengan indikator “NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DENGAN PREDIKAT WTP”.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	- Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			- ketersediaan kas/dana yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah	- Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP OPD	64,39(B)	65(B)	66(B)	67(B)	68(B)
		- Indeks kepuasan masyarakat		82,39(B)	83(B)	84(B)	85(B)	86(B)	87(B)

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya di bidang keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Aset Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2023, dapat diuraikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :



**TABEL 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>9,938,932,350</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>11,785,642,661</b>
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>119,574,500</b>		<b>100%</b>	<b>119,574,750</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>BKAD</b>	5 Dokumen	47,374,900	<b>APBD</b>	5 Dokumen	47,375,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BKAD</b>	8 Laporan	72,199,600	<b>APBD</b>	8 Laporan	72,199,750
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>6,891,051,750</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>7,915,272,632</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BKAD</b>	41 orang	6,060,901,750	<b>APBD</b>	41 orang	7,076,718,519
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>BKAD</b>	12 Dokumen	810,200,000	<b>APBD</b>	12 Dokumen	716,454,113
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>BKAD</b>	12 Dokumen	-	<b>APBD</b>	12 Dokumen	36,000,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	<b>BKAD</b>	2 Dokumen	19,950,000	<b>APBD</b>	2 Dokumen	86,100,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>120,000,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>119,750,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>BKAD</b>	105 Paket	120,000,000	<b>APBD</b>	105 Paket	69,750,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<b>BKAD</b>	5 Orang	-	<b>APBD</b>	5 Orang	50,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>1,128,782,100</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1,627,698,431</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>BKAD</b>	1 Paket	17,370,000	<b>APBD</b>	1 Paket	67,996,500

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	4 Paket	214,800,000	APBD	4 Paket	227,108,949
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKAD	3 Paket	130,000,000	APBD	3 Paket	63,800,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD	1 Paket	49,999,900	APBD	1 Paket	42,792,982
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKAD	12 Dokumen	38,175,000	APBD	12 Dokumen	28,800,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	60 Laporan	599,237,200	APBD	60 Laporan	1,100,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	12 Dokumen	79,200,000	APBD	12 Dokumen	97,200,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>35,152,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>537,426,848</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKAD	1 Unit	21,152,000	APBD	1 Unit	410,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKAD	10 Unit	14,000,000	APBD	10 Unit	127,426,848
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKAD	1 Unit Gedung	-	APBD	1 Unit Gedung	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKAD	20 Unit	-	APBD	20 Unit	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>1,200,400,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1,090,660,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	12 Laporan	3,660,000	APBD	12 Laporan	3,660,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD	12 Laporan	550,738,000	APBD	12 Laporan	295,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD	12 Laporan	646,002,000	APBD	12 Laporan	792,000,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>443,972,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>375,260,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKAD	23 Kendaraan Dinas	249,452,000	APBD	23 Kendaraan Dinas	246,260,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKAD	90 Unit	194,520,000	APBD	90 Unit	60,000,000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD	1 Unit Gedung	-	APBD	1 Unit Gedung	69,000,000
02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku</b>	BKAD	100%	200,586,455,277	APBD	100%	225,778,011,335
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	BKAD	100%	1,626,825,300	APBD	100%	1,788,273,182
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	236,087,000	APBD	2 Dokumen	249,792,635
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	231,865,700	APBD	2 Dokumen	249,275,197
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	2 Dokumen	786,759,700	APBD	2 Dokumen	859,614,837
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	2 Dokumen	213,568,000	APBD	2 Dokumen	262,960,725
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	2 Dokumen	158,544,900	APBD	2 Dokumen	166,629,788
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	BKAD	100%	470,468,100	APBD	100%	622,657,215
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	44 Dokumen	203,783,000	APBD	44 Dokumen	163,572,413
	Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BKAD	44 Laporan	93,570,100	APBD	44 Laporan	31,429,519
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	44 Dokumen	26,400,000	APBD	44 Dokumen	35,166,043
	Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	44 Dokumen	-	APBD	44 Dokumen	103,318,031
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. laporan aliran kas. dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD	44 Laporan	50,052,000	APBD	44 Laporan	31,429,519

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas. Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD	44 Dokumen	-	APBD	44 Dokumen	46,856,000
	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	44 Dokumen	50,605,000	APBD	44 Dokumen	65,173,998
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	44 Dokumen	46,058,000	APBD	44 Dokumen	48,360,942
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD	4 Dokumen	-	APBD	4 Dokumen	48,179,250
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	44 Orang	-	APBD	44 Orang	49,171,500
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	BKAD	100%	694,364,000	APBD	100%	1,135,000,000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan.	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	BKAD	24 Dokumen	113,004,000	APBD	24 Dokumen	200,000,000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD	4 Laporan	219,708,000	APBD	4 Laporan	175,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	175,000,000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	361,652,000	APBD	1 Dokumen	225,000,000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	130,000,000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	44 Orang	-	APBD	44 Orang	230,000,000
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>197,794,797,877</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>222,232,080,938</b>
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BKAD	4 Laporan	182,625,691,600	APBD	4 Laporan	212,029,282,601
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	BKAD	2 Laporan	12,193,776,277	APBD	2 Laporan	5,966,315,901
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	BKAD	4 Laporan	2,975,330,000	APBD	4 Laporan	4,236,482,436
03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>1,565,100,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1,602,950,000</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>BKAD</b>	<b>100%</b>	<b>1,565,100,000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1,602,950,000</b>
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKAD	1 Dokumen	194,800,000	APBD	1 Dokumen	106,500,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	2 Dokumen	41,940,000	APBD	2 Dokumen	57,750,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	44 Laporan	202,440,000	APBD	44 Laporan	176,700,000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	79,860,000	APBD	1 Laporan	77,200,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	10 Laporan	425,540,000	APBD	10 Laporan	437,400,000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	20,350,000	APBD	1 Laporan	85,000,000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	6 Dokumen	378,480,000	APBD	6 Dokumen	468,500,000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	44 Laporan	148,230,000	APBD	44 Laporan	116,700,000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD	2 Laporan	73,460,000	APBD	2 Laporan	77,200,000
					212,090,487,627			239,166,603,996

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini merupakan rencana kerjatahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja (RENJA) BKAD Tahun 2023 dijadikan sebagai bagian Rumusan Penetapan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Rencana Kerja (RENJA) sebagai penajaman Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Program, kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
4. Tata cara penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang telah diuraikan diatas maka ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

- Bahwa penyusunan Rancangan Awal dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah di terlaksana dengan baik.
- Optimalisasi kinerja semua bidang (pegawai) merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam tupoksi di BKAD.
- Rencana tindak lanjut dari program BKAD tetap mengedepankan bekerja dengan baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel.